

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN
PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(OPD) KOTA PEKANBARU**

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Riau
Pekanbaru*



OLEH :

**OKTAVIANI AULIA
NPM. 165310457**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KOTA PEKANBARU

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya yang disebut dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 2021
Yang memberi pernyataan,

(materai 10.000)

Oktaviani Aulia
NPM: 165310457

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada 32 Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh OPD Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan sample purposive dengan jumlah angket sebanyak 96 yang diisi oleh 3 orang di setiap masing-masing OPD Kota Pekanbaru, dan hanya 64 yang kembali kepada peneliti. Jadi, responden untuk penelitian ini adalah 64 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial dan simultan. Untuk pengawasan kualitas laporan keuangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan, sedangkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara determinasi diperoleh nilai R Square atau Koefisien Determinasi sebesar 33.3% yang berarti variabel penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan mampu menerangkan atau menjelaskan pengaruh terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata kunci : Penerapan akuntansi sektor publik; pengawasan kualitas laporan keuangan; akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the effect of the implementation of public sector accounting and quality financial control report on the performance accountability of Pekanbaru's government. This research was conducted in 32 OPDs in the city of Pekanbaru. This study uses a quantitative description method by distributing questionnaires to all Pekanbaru's Corporate workers.

In this study, researcher used purposive sampling in data collection by distributing 96 questionnaires to be filled in by 3 leaders of each Pekanbaru's Corporate workers, and as many as 64 questionnaires were returned to the researcher. So, the respondents for this study were 64 respondents. Data was collected using a questionnaire that had been tested for validity and reliability. The data analysis technique used in this research is multiple regressions.

The results showed that in the Pekanbaru City Regional Apparatus Organization, the application of public sector accounting had a significant effect on the accountability of the performance of government agencies both partially and simultaneously. For the supervision of the quality of financial reports, partially it has no significant effect, while simultaneously it has a significant effect on the accountability of the performance of government agencies. By determination, the value of R Square or the Coefficient of Determination is 33.3%, which means that the variables of public sector accounting application and quality control of financial reports are able to explain or explain the effect on the performance accountability variable of government agencies.

Keywords: Implementation of public sector accounting, quality financial control report and performance accountability of government agencies.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, **“PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KOTA PEKANBARU”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M. Si., Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Dr. Siska, SE., M.Si.,Ak.,CA sebagai ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

4. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih.,Msi.,Ak.,CA selaku dosen Pembimbing Akademik yang juga telah membantu penulis dalam berkonsultasi selama perkuliahan.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Mama, Papa dan Abang yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, serta kasih sayang, kesabaran dan ketulusan yang telah diberikan selama ini.
7. Untuk teman-teman Syafira, Suci, Putty dan Julio yang selalu memberikan dukungan dan ada bersama-sama dalam keadaan suka maupun duka, serta teman-teman Akuntansi 2016 yang sama-sama berjuang untuk meraih gelar sarjana ekonomi.
8. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Pekanbaru, 26 Juli 2021
Penulis,

OKTAVIANI AULIA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	10
2.1. Telaah Pustaka	10
2.1.1. Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.1.2. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	15
2.1.3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	21
2.2. Penelitian Terdahulu	23
2.3. Kerangka Pemikiran	25
2.3.1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	25
2.3.2. Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	26
2.3.3. Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	27
2.4. HIPOTESIS	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Desain Penelitian	29
3.2. Objek dan Lokasi Penelitian	29
3.3. Populasi dan Sampel	29
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5. Operasional Variabel	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7. Teknik Analisis Data	35
3.7.1. Uji Instrumen.....	35

3.7.2. Analisis Regresi Linier Berganda.....	36
3.7.3. Uji Asumsi Klasik	37
3.7.4. Uji Hipotesis.....	38
3.7.5. Uji R ² (Koefisien Determinasi)	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
4.1.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	40
4.1.2. Demografi.....	44
4.1.3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru.....	45
4.1.4. Struktur Organisasi dan Tatakerja Kota Pekanbaru	45
4.2. Hasil Pengumpulan Data	47
4.2.1. Data Penelitian	47
4.2.2. Teknik Analiis Data.....	48
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	59
4.3.1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kota Pekanbaru	59
4.3.2. Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kota Pekanbaru	60
4.3.3. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kota Pekanbaru	61
BAB V KESIMPULAN	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Distribusi sampel pada tiap OPD Kota Pekanbaru	30
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	34
Tabel 3.3 Klasifikasi Jawaban Kuesioner	35
Tabel 4.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.....	46
Tabel 4.2 Tingkat Pengembalian Kuisisioner.....	47
Tabel 4.3 Descriptive Statistics.....	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	49
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	50
Tabel 4.6 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	52
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	53
Tabel 4.8 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	54
Tabel 4.9 Regresi Linier Berganda	55
Tabel 4.10 Hasil Uji t.....	56
Tabel 4.11 Hasil Uji F.....	57
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	28
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	51
Gambar 4.2 Normal Probability Plot	54
Gambar 4.3 Scatterplot.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Bukti Keterangan Penelitian

Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 3 : Distribusi Jawaban Responden

Lampiran 4 : Hasil Output SPSS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya (Bastian, 2011). Kebijakan reformasi keuangan negara atau daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* pada instansi pemerintah di Indonesia mulai dilaksanakan seiring dengan berlakunya aturan mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (2010). Prinsip yang harus dilaksanakan adalah tata kelola keuangan yaitu penyajian laporan keuangan yang baik. Agar terwujudkan *good governance* instansi pemerintah perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah sehingga akan meminimalisir praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2012). Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada bidang politik akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dibidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi.

Menurut Nurgaeni & Budiantara (2019) akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah pusat maupun daerah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat mempetbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan- urusan pemerintah dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi.

Meskipun seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparatur pemerintahnya itu sendiri (Jannaini, 2012).

Penelitian-penelitian mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah telah banyak sebelumnya diteliti oleh para ahli. Seperti penelitian Ramdhanu (2019) pengaruh penerapan laporan akuntansi sektor publik dan pengawasan laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah studi pada BAPENDA Provinsi NTB secara parsial variabel pengawasan laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara simultan variabel penerapan laporan akuntansi sektor publik dan pengawasan laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Begitu juga dengan penelitian Pamungkas (2012) yang menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka menunjukkan akuntabilitas kinerja, maka antara lain diperlukan akuntabilitas keuangan yang dapat mengukur dan menilai upaya capaian hasil.

Berdasarkan opini BPK Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru (LKPD) untuk periode yang telah berakhir pada 31 desember 2019 yang terdiri dari : laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, Laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan Catatan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2019 yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut : (1. Opini atas Laporan Keuangan : Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah wajar tanpa pengecualian (WTP).; 2. Sistem Pengendalian Intern : BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu : a. Kewajiban atas Pajak Pusat dari Pemko Pekanbaru yang belum dapat divalidasi sebesar Rp5.626.249.156,00; b. Kesalahan penganggaran belanja hibah pada belanja modal sebesar Rp2.821.010.520,00; dan c. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemko Pekanbaru belum tertib.; 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan : BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya yaitu : a. Pembayaran gaji dan tambahan penghasilan kepada pegawai yang telah pensiun senilai Rp276.798.879,00 tidak sesuai dengan ketentuan; b. Pembayaran sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada 14 OPD membebani keuangan daerah senilai Rp47.322.574,00 dan bukti SPJ pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tidak lengkap senilai Rp1.951.500,00; c. Kekurangan volume pekerjaan pada 13 Paket Pekerjaan Belanja Modal senilai Rp569.122.506,72; d. Denda keterlambatan belum dikenakan pada tiga paket pekerjaan belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan senilai Rp228.269.588,02; e. Realisasi pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sesuai kondisi senyatanya senilai Rp749.067.790,00; f. Penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak sesuai dengan peraturan

daerah yang berlaku; g. Pemberian insentif pemungutan pajak daerah belum sesuai ketentuan; dan h. Pemerintah Kota Pekanbaru belum menerima seluruh bagi hasil keuntungan dari perjanjian kerja sama pengelolaan pasar dan denda keterlambatan pembayaran royalti yang belum ditagihkan kepada pengelola pasar.)

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Pekanbaru antara lain agar : (1. Kepala BPKAD untuk mempercepat penelusuran selisih atas hasil rekonsiliasi pajak yang belum dapat divalidasi oleh KPPN; 2. TAPD dan Pokja TAPD memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengevaluasi RKA/P dan DPA/DPPA; 3. Kepala BPKAD supaya memerintahkan Kabid Aset BPKAD untuk membuat perjanjian pinjam pakai kendaraan dinas yang dipinjam oleh pihak lain; 4. Kepala BPKSDM supaya menerbitkan Surat Keputusan Pensiun dan Pemberhentian tepat waktu; dan 5. Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Bappenda, Plt. Sekretaris DPRD selaku pengendali anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas Daerah.)

Fenomena yang terjadi yang diakui oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bahwa laporan ini adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menata dan mengelola transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan masih adanya kekurangan sehingga mereka masih mengharapkan tanggapan, masukan,

serta saran yang membangun sehingga dapat menyempurnakan LKDP yang akuntabel.

Dapat disimpulkan bahwan Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut pengguna dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambil keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan baik sepenuhnya, maka perlu diteliti kembali mengenai hal tersebut untuk mencari tahu kebenarannya dan sekaligus sebagai landasan teoritis bagi peneliti dalam mencari *gap* dari penelitian-penelitian diatas. Oleh karena itu peneliti tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan membuat skripsi yang berjudul: **Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa evaluasi dan tambahan pengetahuan khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada kajian relevan selanjutnya bagi peneliti yang akan datang untuk meneliti lebih lanjut sehingga mendapatkan kebaharuan kedepannya.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan defenisi operasional variabel, lokasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran kepada pihak yang akan melakukan penelitian dimasa mendatang.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

Sektor Publik memiliki pengertian yang beragam dikarenakan dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Wiratna (2015) Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Pengertian lain dari akuntansi sektor publik merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan keuangan yang diterapkan di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah yang berguna untuk pengambilan keputusan (Pratiwi, 2013).

Dalam siklus akuntansi sektor publik laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Dan berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang

pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Berikut ini adalah siklus akuntansi keuangan sektor publik menurut Bastian (2011).

1. Analisis Bukti Transaksi
2. Pencatatan data transaksi
3. Pengikhtisaran
4. Pelaporan

Selama satu periode akuntansi, transaksi yang dicatat dan dikelompokkan kedalam buku besar kemudian. Berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya (Sari, 2015).

a. Peran Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan. Akuntansi dibutuhkan pada setiap jenis organisasi baik sektor bisnis, sektor publik maupun sektor sosial. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain : Pengelolaan keuangan Negara, Pelaporan Keuangan, Pemeriksaan, Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Mahmudi, 2011)

b. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negaradalam rangka pelaksanaan

konstitusi negara (Mahmudi, 2011). Organisasi sektor publik pada umumnya berupa lembaga-embaga negara atau pemerintahan atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara. Mahmudi (2011) menyatakan bahwa organisasi sektor publik sangat luas cakupannya, bervariasi dan bergerak dalam lingkungan yang kompleks. Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor publik jika memenuhi karakteristik seperti berikut ini :

- 1) Organisasi bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan publik,
- 2) Organisasi berasosiasi dengan pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan negara,
- 3) Organisasi bukan milik pribadi atau sekelompok orang tetapi menjadi milik publik atau milik negara.

c. Standar Akuntansi Sektor Publik

Menurut Yusra (2016) standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan standar akuntansi antara lain:

- a. Standar pemberi pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.
- b. Standar pemberi petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritas nya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajaran nya.
- c. Standar pemberi petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya.
- d. Standar menghasilkan prinsip dan teori penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi

Akuntansi sektor publik sendiri dikenal dengan akuntansi pemerintahan, dalam akuntansi pemerintahan ini data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Karena akuntansi keuangan pemerintah menghasilkan informasi bagi pihak intern maupun ekstern pemerintah, sehingga dapat digolongkan sebagai akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan.

d. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Dalam buku “Akuntansi Sektor Publik” Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas (2010) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*). Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
- 2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*). Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
- 3) Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*). Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa mendatang. Laporan keuangan berfungsi memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan data.
- 4) Kelangsungan organisasi (*viability*). Laporan keuangan berfungsi membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa mendatang.
- 5) Hubungan masyarakat (*public relation*). Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi

sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

- 6) Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figure*). Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

2.1.2. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

a. Pengertian Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu (Harahap, 2011). Adapun jenis laporan keuangan yang dikenal adalah Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut Fahmi (2013:2) laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh instansi yang bersangkutan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:5) mengemukakan bahwa: Pengertian laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*), dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya.

Bastian (2013:9) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk

pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sementara menurut Mahmudi (2013:143) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan.

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan pemerintah yang berguna (*useful*) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat isi informasi (*information content*). Laporan keuangan akan berguna (*useful*) apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif (Suhardjo, 2013:97).

b. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut (Pemerintah Indonesia, 2010) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI No 17 Tahun 2010) dijelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Manfaat umpan balik (Feedback Value) adalah informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
 - b. Manfaat prediktif (Predictive Value) adalah informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu adalah informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap adalah informasi yang disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
- a. Penyajian jujur adalah informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari

sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.

- c. Netralitas adalah informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah sangat berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, dalam rangka memenuhi seluruh informasi yang diperlukan dalam mewujudkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang dikehendaki

diperlukannya ukuran normatif. Kualitas pelaporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator (Darwanis, Saputra, & Kartini, 2016) antara lain:

1. Manfaat dari pelaporan keuangan yang dihasilkan, yaitu merupakan salahsatu unsur prasyarat normatife pelaporan keuangan, yaitu relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yakni informasi dalam laporan keuangan memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya dan memiliki manfaat prediktif (*prediktif value*), yakni informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
2. Ketepatan waktu pelaporan keuangan, yaitu penyajian laporan keuangan secara tepat waktu merupakan aspek penting untuk memperoleh keunggulan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan akan bermanfaat jika disampaikan secara tepat waktu kepada pemakainya, informasi yang tepat waktu akan memiliki nilai dan dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.
3. Kelengkapan informasi yang disajikan, yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan selengkap mungkin, serta mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi utama termuat dengan jelas agar mencegah kekeliruan dalam penggunaan informasi. Informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan kesulitan karena bagian informasi yang tidak

dicantumkan bisa saja merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan itu sendiri.

4. Penyajian secara jujur, yaitu informasi akuntansi pemerintah harus disajikan secara jujur, yaitu menggambarkan dengan jujur setiap transaksi serta peristiwa lainnya sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Semakin jujur dalam penyajian laporan keuangan, maka akan meningkatkan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.
5. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan laporan keuangan harus dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Ada dua cara untuk memverifikasi laporan keuangan, secara langsung dan tidak langsung. Verifikasi langsung terhadap laporan keuangan dilakukan melalui observasi, perhitungan, dan pengukuran
6. Isi laporan keuangan dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.
7. Keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus akurat dan jelas, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh para pengguna laporan

keuangan. Oleh karena itu, pengguna harus memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas akuntansi dan pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akbar (2012) mengatakan bahwa Akuntabilitas (accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban, namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata accountability itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen.

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik merupakan definisi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). BPKP (2011).

Dalam Presiden Republik Indonesia (2010) dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

a. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dalam Wulandari (2018), Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terwujud dengan baik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi , serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut Nasirn & Oktari (2011) merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap sebagai berikut :

1. Penetapan rencana stratejik
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel Digunakan	Hasil Penelitian
1.	(Santoso & Pambelum, 2008)	Penerapan akuntansi sektor public, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pencegahan <i>fraud</i>	Secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam pencegahan <i>fraud</i> baik secara partial maupun secara bersama-sama.
2.	(Fedrinawati, 2016)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara parsial kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan secara simultan penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3.	(Pratiwi, 2013)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi. Penerapan akuntansi sektor publik memiliki hubungan erat yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja instansi

			pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diterapkannya akuntansi sektor publik maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki pengaruh signifikan.
4.	(Pamungkas, 2012)	Akuntansi sektor public, pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun simultan.
5.	(Wina & Khairani, 2014)	Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, dan Dishub Prov)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil yang didapatkan dari uji parsial untuk variabel x1 dengan nilai $2,326 > 2,037$ dengan signifikansi $0,027 < 0,05$ dan variabel x2 dengan nilai $4,946 > 2,037$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, kemudian hasil dari uji simultan dengan nilai $29,506 > 3,285$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Berarti, jika standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawsan kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan maka akan menghasilkan kinerja akuntabilitas yang baik.

Sumber : Jurnal&Skripsi

2.3. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang digambarkan sebagai berikut:

2.3.1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban publik. Bastian (2011)

Dalam penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengemukakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat berpengaruh baik secara parsial maupun simultan. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran. Pamungkas (2012).

Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menuntut adanya pengendalian akuntansi sektor publik untuk mengetahui sejauh mana kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penggunaan teknologi informasi dilingkungan sektor publik dapat membantu pemerintah dalam memberikan informasi dengan lebih cepat, efektif dan efisien kepada masyarakat.

2.3.2. Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan keuangan merupakan komponen penting pada penyelenggaraan pemerintah, karena laporan keuangan berdampak pada kinerja dalam pengelolaan keuangan yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adanya pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas yaitu secara teoritis penerapan akuntansi sektor publik dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Santoso & Pambelum (2008). Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas. Karena dengan adanya laporan keuangan yang baik atau berkualitas akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat.

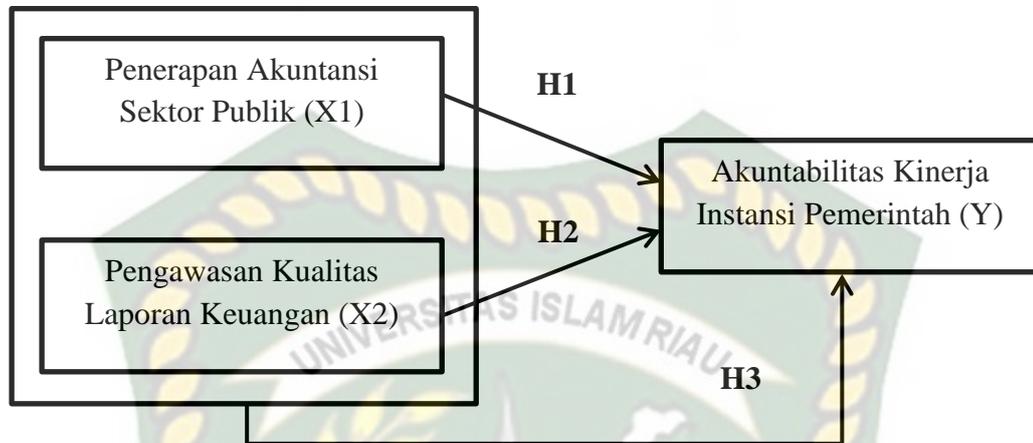
2.3.3. Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik dan pemaparan laporan keuangan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam instansi pemerintah.

Hasil dari penelitian Wina & Khairani (2014) menunjukkan bahwa kedua variabel secara simultan berpengaruh positif. Semakin tinggi pengaruh standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan maka akan meningkatkan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin baik pula.

Dengan kata lain, apabila akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai standar pelaporan akuntansi sektor publik, lalu dibarengi dengan pengawasan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal dan pihak internal yang dilakukan secara independensi, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar pemerintahan yang berlaku. Wina & Khairani (2014).

Gambar 2.1 Model Penelitian



2.4. HIPOTESIS

- H1 : Terdapat pengaruh antara variabel penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial.
- H2 : Terdapat pengaruh antara variabel pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial.
- H3 : Terdapat pengaruh antara variabel penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara simultan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan suatu informasi dibalik angka-angka tersebut (Martono, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan survey. Penelitian survey merupakan penelitian yang menggunakan sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun & Effendi, 2001).

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek yang menjadi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kota Pekanbaru.

3.3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kota Pekanbaru yang berjumlah 45 OPD. Sampel dalam penelitian ini adalah 32 OPD yang terdiri dari dinas dan badan. Terdapat 13 OPD yang tidak dilakukan penelitian yaitu OPD Kecamatan. Alasan peneliti hanya mengambil 32 OPD sebagai sampel yaitu untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan kondisi kesehatan ditengah wabah virus corona saat ini. Dari setiap OPD akan diambil 3 responden dengan kriteria satu orang dari Kasubag Keuangan dan dua orang Staf Keuangan/Akuntansi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu. Kriteria dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dan memiliki hubungan dengan variabel yang diteliti, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 96 responden.

Tabel 3.1
Distribusi sampel pada tiap OPD Kota Pekanbaru

NO.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Kuesioner yang disebar
1.	Sekretariat Daerah	3
2.	Sekretariat DPRD	3
3.	Inspektorat	3
4.	Dinas Pendidikan	3
5.	Dinas Kesehatan	3
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3
8.	Dinas Sosial	3
9.	Dinas Pemedam Kebakaran dan Penyelamatan	3
10.	Dinas Tenaga Kerja	3
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3
12.	Dinas Ketahanan Pangan	3
13.	Dinas Pertanahan	3
14.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3
17.	Dinas Perhubungan	3
18.	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	3
19.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3
21.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3
23.	Dinas Pertanian dan Perikanan	3

24.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
27.	Badan Penelitian dan Pengembangan	3
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3
29.	Badan Pendapatan Daerah	3
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3
32.	Satuan Polisi Pamong Praja	3
Jumlah		96

Sumber: (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2019)

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang telah dirancang untuk dilakukan pengujian mengenai tanggapan responden terhadap variabel penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan indikator yang dijelaskan pada konsep operasional.

3.5. Operasional Variabel

1. Variabel Bebas / Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain melainkan variabel yang mempengaruhi variabel terikat.

a. Penerapan akuntansi sektor publik (X_1)

Akuntansi sektor publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memastikan standar yang telah ditetapkan telah terealisasi dengan baik dan memastikan semua pihak telah bekerja sesuai standar yang berlaku (Mardiasmo, 2009). Indikator pada variabel ini adalah kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, perencanaan dan informasi otorisasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat, dan

sumber fakta dan gambaran. Pengukuran variabel ini mengadopsi instrumen kuesioner dari (Fedrinawati, 2016). Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu dari skala 1 sangat tidak setuju, sampai skala 5 sangat setuju.

b. Pengawasan kualitas laporan keuangan (X_2)

Pengawasan kualitas laporan keuangan merupakan suatu tindakan pengawasan yang menilai baik buruknya pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan kualitas laporan keuangan dalam suatu instansi. (Pemerintah Indonesia, 2010) tentang Standar Akuntansi Keuangan, menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Indikator untuk variabel ini adalah relevan (*feedback value*, memprediksi masa yang akan datang, tepat waktu, lengkap), andal (penyajian jujur, dapat diverifikasi, netral), dapat dibandingkan, dapat dipahami. Pengukuran variabel ini mengadopsi instrumen kuesioner dari (Fedrinawati, 2016). Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu dari skala 1 sangat tidak setuju, sampai skala 5 sangat setuju.

2. Variabel Terikat / Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.

a. Akuntabilitas kinerja instansi (Y)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2010). Pengukuran variabel ini mengadopsi instrumen kuesioner dari (Fedrinawati, 2016) dengan 4 indikator yaitu penetapan perencanaan strategik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu dari skala 1 sangat tidak setuju, sampai skala 5 sangat setuju.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket/kuesioner. Angket ini berisi pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Pernyataan disusun sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat dan penyusunan butir-butir pernyataan kuesioner mempertimbangkan kemudahan pengisian oleh responden, maka penyusunannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghindari pernyataan yang meragukan
- b. Menghindari kata-kata yang tidak jelas
- c. Tidak menggunakan kata-kata yang menimbulkan rasa curiga atau antipati dari responden

Dalam penelitian ini penyebaran kuesioner dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru. Adapun bentuk instrumen dalam penelitian ini dengan menggunakan variabel pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
Akuntansi Sektor Publik (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan dan Pengelolaan 2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif 3. Perencanaan dan informasi otorisasi 4. Kelangsungan organisasi 5. Hubungan masyarakat 6. Sumber fakta dan gambaran 	STS = Sangat tidak setuju TS = Tidak setuju CS = Cukup setuju S = Setuju SS = Sangat setuju	(Fedrinawati, 2016)
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami 	STS = Sangat tidak setuju TS = Tidak setuju CS = Cukup setuju S = Setuju SS = Sangat setuju	(Fedrinawati, 2016)
Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan perencanaan strategik 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Pemanfaatan informasi kinerja 	STS = Sangat tidak setuju TS = Tidak setuju CS = Cukup setuju S = Setuju SS = Sangat setuju	(Fedrinawati, 2016)

3.7. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data ini penulis menggunakan metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan hubungan fungsional antara variabel independen, dengan demikian analisis data kuantitatif dapat dilakukan perhitungannya. Dalam perhitungan menggunakan skala ordinal yang pengukurannya sebagai berikut. (Dr. Riduwan, 2010).

Tabel 3.3
Klasifikasi Jawaban kuisisioner

No	Klasifikasi Jawaban	Skor
1	Sangat setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Cukup setuju (CS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: (Dr. Riduwan, 2010)

3.7.1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut. Uji Validitas dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel, Dengan membandingkan nilai rhitung dari hasil output (Corrected Item-Total Correlation) dengan rtabel, jika rhitung lebih besar dari rtabel maka butir pertanyaan tersebut adalah valid, tetapi jika rhitung lebih kecil dari pada rtabel maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2016).

b. Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2016) uji reliabilitas digunakan untuk menguji data dari kuesioner yang kita bagikan. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal respon dari seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tingkat *reliable* atau variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistic Cronbach alpha (α). Variabel atau konstruk dikatakan *reliable* jika nilai Cronbach alpha $>0,60$. Semakin nilai alphanya mendekati satu, maka nilai reliabilitasnya semakin terpercaya.

3.7.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen apakah hubungan variabel independen atau dependen berhubungan positif dan negatif.

Dengan Persamaan:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas Kinerja
- α = Konstanta
- $b_{1,2}$ = Koefisien Regresi
- X_1 = Penerapan Akuntansi Sektor Publik
- X_2 = Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan
- e = Tingkat Error

3.7.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan bantuan software SPSS.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan sebagai pengujian apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Untuk menguji data yang berdistribusi normal akan digunakan alat uji normalitas, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2016). Uji Kolmogorov Smirnov merupakan uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi variabel dependen memiliki nilai signifikan lebih dari 5%. Data penelitian yang baik ialah yang berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas berguna untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam regresi ada beberapa cara, salah satunya adalah dengan melihat dari nilai variance bebas yang memiliki $VIF > 10$ atau nilai *tolerance* $< 0,10$ maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi (Ghozali, 2016).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Gejala heteroskedastisitas dapat diketahui dengan cara melihat pola grafik *scatterplot*. Jika titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Cara lain yang dapat dilakukan untuk memastikan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yaitu menggunakan uji glejser. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen $>0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.7.4. Uji Hipotesis

Hipoesis bertujuan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel yaitu pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan:

a. Uji t

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel yaitu pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan untuk uji ini yaitu, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H_0 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka H_0 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016).

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2016) :

1. Menentukan formulasi hipotesis :

$H_0 : b_1 = 0$ artinya, semua variabel (X) secara simultan tidak mempengaruhi variabel terikat (Y)

$H_a : b_1 > 0$ artinya, semua variabel (X) secara simultan mempengaruhi variabel terikat (Y)

2. Menentukan kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$)

3. Menentukan signifikansi :

Nilai signifikansi (P value) $< 0,05$, maka H_a diterima.

Nilai signifikansi (P value) $> 0,05$, maka H_a ditolak.

3.7.5. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Menurut (Ghozali, 2016), uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Ini berarti jika $R^2=0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, dan jika R^2 semakin besar mendekati 1, maka menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika R^2 semakin kecil mendekati 0 maka dapat dikatakan semakin kecil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

a. Gambaran Umum OPD di Kota Pekanbaru

Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Kota Pekanbaru dibantu oleh beberapa OPD. Sebagai pengguna anggaran OPD yang bersangkutan menjalankan tugasnya dengan melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugas. Setiap OPD membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan Keuangan daerah.

OPD Kota Pekanbaru memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kota Pekanbaru. Adapun tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
2. Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Pekanbaru.
3. Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru.
4. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

5. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
8. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
9. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
10. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
11. Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
13. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
14. Dinas Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
15. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
18. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
19. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persendian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
22. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
24. Dinas Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan.
25. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan perdagangan dan bidang perindustrian.
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana.

28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi penunjang kesatuan berbangsa dan berpolitik.
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
30. Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
31. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
32. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang pendapatan.

b. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan sarana jalan darat yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Senapelan yang sekarang lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan dan ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M.

c. Geografis dan Administrasi Wilayah Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan menjadi 12 Kecamatan dengan 83 Kelurahan.

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101014' – 101034' BT dan 0025' – 0 045' LU, dengan batas administrasi sebagai berikut: - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

4.1.2. Demografi

Penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2014 sebanyak 1.021.710 jiwa, yang terdiri dari 497.443 jiwa penduduk laki-laki dan 524.267 jiwa penduduk perempuan dengan seks rasio sebesar 105. Apabila dibandingkan antara jumlah

penduduk dengan luas wilayah Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2014 sebesar 1.595 jiwa/km².

4.1.3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru :

Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.

Misi Kota Pekanbaru :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi.
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik.
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE).
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

4.1.4. Struktur Organisasi dan Tatakerja Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2016, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 perlu ditetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan

susunan perangkat daerah Kota Pekanbaru. Susunan organisasi perangkat daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

NO.	Nama OPD Kota Pekanbaru
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
8.	Dinas Sosial
9.	Dinas Pemedam Kebakaran dan Penyelamatan
10.	Dinas Tenaga Kerja
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.	Dinas Ketahanan Pangan
13.	Dinas Pertanahan
14.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17.	Dinas Perhubungan
18.	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
19.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
21.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23.	Dinas Pertanian dan Perikanan
24.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
25.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
30.	Badan Pendapatan Daerah
31.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
33.	Satuan Polisi Pamong Praja
34.	Kecamatan Bukit Raya
35.	Kecamatan Marpoyan Damai
36.	Kecamatan Payung Sekaki

37.	Kecamatan Rumbai
38.	Kecamatan Rumbai Pesisir
39.	Kecamatan Tampan
40.	Kecamatan Tenayan Raya
41.	Kecamatan Limapuluh
42.	Kecamatan Pekanbaru Kota
43.	Kecamatan Sail
44.	Kecamatan Payung Sekaki
45.	Kecamatan Senapelan

Sumber: (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2019)

4.2. Hasil Pengumpulan Data

4.2.1. Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Pada penelitian ini kuesioner yang disebar sebanyak 96 pada 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru. Total kuesioner yang dibagikan adalah 96 kuesioner (100%). Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 64 dan kuesioner yang tidak kembali atau tidak mendapat respon sebanyak 32. Kuesioner yang kembali semuanya dapat diolah yaitu sebanyak 64. Rincian pengembalian kuesioner oleh para responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tingkat Pengembalian Kuesioner

KETERANGAN	TOTAL
Kuesioner yang dikirim	96
Kuesioner yang tidak dapat respon	32
Kuesioner yang kembali	64
Kuesioner yang dapat diolah	64

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Untuk kuesioner yang telah disebar namun tidak mendapatkan respon hal ini dikarena saat ini sedang terjadi pandemi wabah virus corona yang menghambat aktivitas kerja responden sehingga ada beberapa OPD yang menolak untuk mengisi form kuisisioner, ada yang bekerja dari rumah (WFH) sehingga kuisisionernya tidak ada yang bisa mengisi dan dan adanya faktor kesibukan lain.

4.2.2. Teknik Analiis Data

4.2.2.1. Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan, dan menggunakan variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja.

Tabel 4.3
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X ₁	64	34	45	38.11	3.035
X ₂	64	28	40	33.69	2.696
Y	64	23	38	32.50	2.900
Valid N (listwise)	64				

Sumber : Output SPSS 22, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut Penerapan akuntansi sektor publik (X₁) memiliki 64 responden dengan nilai minimum 34, nilai maximum 45 dan nilai rata-rata jawaban responden 38.11 dengan standar deviasi 3.035 Pengawasan kualitas laporan keuangan (X₂) memiliki 64 responden dengan nilai minimum 28, nilai maximum 40 dan nilai rata-rata responden 33.69 dengan standar deviasi 2.696. selanjutnya, Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki 64 responden dengan nilai minimum 23, nilai maximum 38 dan nilai rata-rata jawaban responden 32.50 dengan standar deviasi 2.900.

4.2.2.2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur apakah sebuah kuisioner valid atau tidak dan menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Berikut ini adalah hasil uji validitas pada variabel penelitian:

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

Variable	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9
Jumlah	270	269	282	276	266	267	266	266	277
Nilai Korelasi	0,47 0	0,36 9	0,69 9	0,58 6	0,70 5	0,63 0	0,80 8	0,70 9	0,70 1
Sig. Korelasi	0,00 0	0,00 3	0,00 0						
Keterangan	valid								
Variable	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	
Jumlah	267	263	270	277	264	265	269	281	
Nilai Korelasi	0,57 0	0,56 0	0,52 1	0,40 3	0,61 7	0,60 3	0,69 2	0,62 7	
Sig. Korelasi	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	
Keterangan	valid								
Variable	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
Jumlah	239	254	266	271	258	260	270	262	
Nilai Korelasi	0,88 0	0,64 2	0,52 3	0,82 3	0,50 1	0,57 7	0,25 0	0,30 8	
Sig. Korelasi	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,04 7	0,01 3	
Keterangan	valid								

Sumber : Output SPSS 22, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel memenuhi kriteria valid, adapun kriteria kuesioner yang valid yaitu setiap item pernyataan/pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. variabel tersebut dikatakan cronbach alpha nya memiliki nilai lebih besar 0,60 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2018). Berikut ini hasil uji reliabilitas:

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penerapan akuntansi sektor publik	0,817	<i>Reliable</i>
Pengawasan kualitas laporan keuangan	0,707	<i>Reliable</i>
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0,719	<i>Reliable</i>

Sumber : Output SPSS 22, 2020

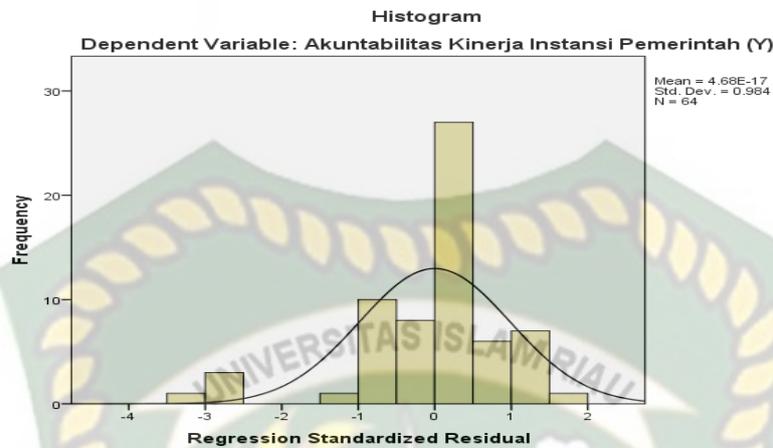
Tabel 4.5 menunjukkan nilai *Cronbach alpha* pada masing-masing variabel dengan pernyataan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini *reliable* karena secara keseluruhan bernilai lebih dari 0,60.

4.2.2.3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak (Siregar, 2014). Uji normalitas bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis regresi berganda, yaitu variabel–variabel independen dan dependen harus berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018).

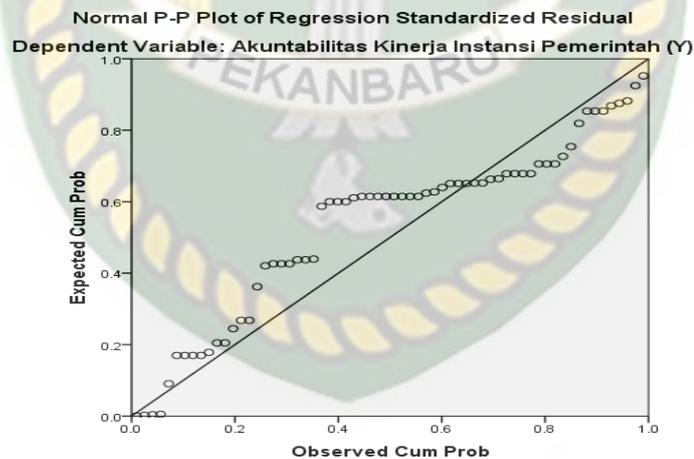
Gambar 4.1 Grafik Histogram



Sumber : Output SPSS 22, 2020

Berdasarkan grafik histogram diatas ini, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti arah diagonal.

Gambar 4.2 Normal Probability Plot



Sumber : Output SPSS 22, 2020

Berdasarkan grafik normal plot diatas ini, kita dapat melihat bahwa tidak menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal.

Uji statistik sederhana yang digunakan untuk menguji asumsi normalitas adalah dengan menggunakan uji normalitas dari Kolmogorov Smirnov. Metode pengujian normal setidaknya distribusi data dilakukan dengan melihat nilai signifikansi variabel, jika signifikan lebih besar dari 0,05 pada taraf signifikansi alpha 5%, maka menunjukkan distribusi data normal.

Tabel 4.6
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.36818901
Most Extreme Differences	Absolute	.229
	Positive	.119
	Negative	-.229
Test Statistic		.229
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069 ^{c,d}

Sumber : Output SPSS 22, 2020

Dari tabel 4.6 dibawah ini dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas menyatakan kolmogrov-Smirnov test dengan nilai signifikan .069. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan melihat grafik dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi (Ghozali, 2016). Alat statistik

yang sering digunakan untuk menguji gangguan multikolinieritas adalah variance inflation faktor (VIF) dan nilai *tolerance*. Apabila nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)	.631	1.586
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)	.631	1.586

Sumber : Output SPSS 22, 2020

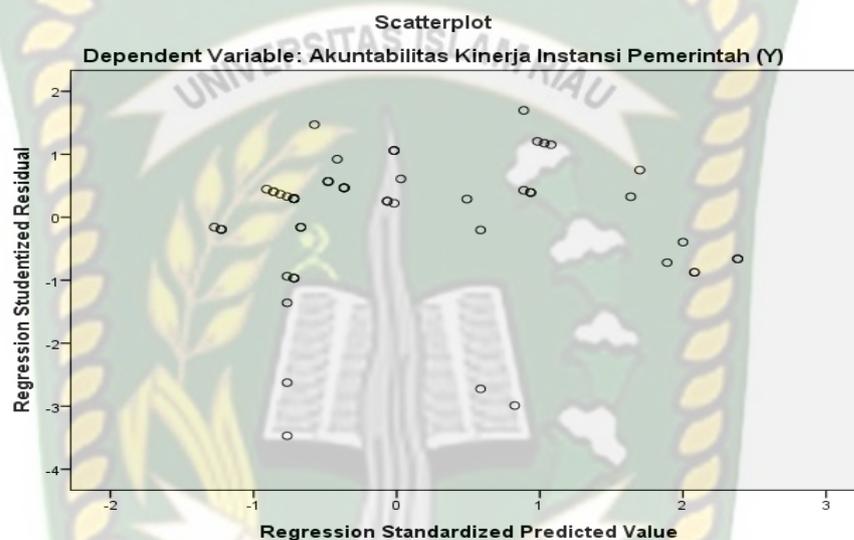
Berdasarkan hasil uji diatas dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinieritas variabel penerapan akuntansi sektor publik memiliki nilai VIF 1.586 dan nilai *tolerance* sebesar 0.631 dan pengawasan kualitas laporan keuangan memiliki nilai VIF 1.586 dan nilai *tolerance* sebesar 0 .631. Dari kedua variabel tersebut semua nilai toleransi berada diatas 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

c. Uji Heterokedatisitas

Dalam uji regresi dapat dikatakan baik jika tidak terjadi gejala heterokedatisitas. Heterokedatisitas terjadi jika scatter plot titik-titiknya mempunyai pola yang tidak teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang.

Dapat dilihat dari hasil *scatter plot* dibawah ini diperoleh bahwa titik penyebaran diatas dan dibawah sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Hal ini berarti variabel penerapan akuntansi sektor publik (X_1) dan Pengawasan kualitas laporan keuangan (X_2) tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.3 Scatterplot



Sumber : Output SPSS 22, 2020

Untuk memastikan tidak terjadi gejala heterokedastisitas peneliti juga menggunakan uji glejser, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.017	2.885		-.353	.726
	Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X_1)	.028	.085	.052	.324	.747
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X_2)	.050	.096	.083	.518	.607

Sumber : Output SPSS 22, 2020

Dilihat dari hasil tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dengan menggunakan uji glejser, probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari heterokedastisitas.

4.2.2.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil regresi linier berganda menggunakan SPSS 22 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	10.532	4.247
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)	.506	.126
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)	.080	.142

Sumber : Output SPSS 22, 2020

Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah :

$$Y = 10.532 + 0.506X_1 + 0.080X_2$$

Hasil dan pembahasan regresi diatas adalah :

- a) Nilai konstanta α (nilai mutlak Y) = 10.532 artinya jika Penerapan akuntansi sektor publik dan Pengawasan kualitas laporan keuangan konstan atau (nol) maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bernilai 10.532 atau akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat.

- b) Nilai koefisien regresi variabel penerapan akuntansi sektor publik (X_1) sebesar 0.506 artinya jika penerapan akuntansi sektor publik mengalami kenaikan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.506 dengan asumsi variabel lain konstan.
- c) Nilai koefisien regresi variabel Pengawasan kualitas laporan keuangan (X_2) sebesar .080 artinya jika Pengawasan kualitas laporan keuangan mengalami kenaikan 1, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar .080 dengan asumsi variabel lain konstan.

4.2.2.5. Pengujian Hipotesis

a. Uji Partial Uji (t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel-variabel independen yang ada dalam model regresi secara individu terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Jika nilai *probability t* kurang dari 0,05 maka H_a diterima dan H_o ditolak, dan apabila jika nilai *probability t* lebih dari 0,05 maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Tabel 4.10
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.532	4.247		2.480	.016
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X_1)	.506	.126	.529	4.020	.000
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X_2)	.080	.142	.074	.565	.574

Sumber : Output SPSS 22, 2020

1) Hipotesis Pertama (H1)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.10 maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Dimana signifikansinya $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik (X_1) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2) Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.10 maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta variabel independen. Dimana signifikansinya $0,574 > 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa Pengawasan kualitas laporan keuangan (X_2) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh dari seluruh variabel independen yang ada dalam model regresi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima.

Tabel 4.11
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	176.676	2	88.338	15.251	.000 ^b
	Residual	353.324	61	5.792		
	Total	530.000	63			

Sumber : Output SPSS 22, 2020

3) Hipotesis Ketiga (H3)

Berdasarkan dari hasil uji F pada tabel 4.11 dapat dilihat nilai signifikan yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik (X_1) dan Pengawasan kualitas laporan keuangan (X_2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Uji ini berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

c. Koefisien Determinasi

Uji ini berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 4.12
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.577 ^a	.333	.311	2.407	1.653

Sumber : Output SPSS 22, 2020

Dari hasil pembahasan diatas, koefisien determinasi dilihat dari nilai R Square sebesar .333 atau 33.3% , hal ini menunjukkan bahwa variabel- variabel independen mampu meningkatkan kinerja sebesar 33.3% sedangkan sisanya yaitu 66,7% dijelaskan oleh faktor-faktor selain variabel yang diteliti.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kota Pekanbaru

Hasil pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik (X_1) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggung jawaban publik (Bastian, 2011). Menurut penelitian Bambang Pamungkas (2012) penerapan akuntansi sektor publik, berpengaruh terhadap kinerja instansi. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan objek pengeluaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila dengan telah

diterapkan akuntansi sektor publik didalam instansi pemerintah pada OPD Kota Pekanbaru maka kinerja suatu instansi tersebut mengalami perbaikan ke yang lebih baik.

4.3.2. Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.10 maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta variabel independen. Dimana signifikansinya $0,574 > 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa Pengawasan kualitas laporan keuangan (X_2) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Dalam teorinya, pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan, sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik.

Pengawasan kualitas laporan keuangan di OPD Kota Pekanbaru bisa saja bukan menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kinerja OPD Pekanbaru, tetapi ada beberapa hal yang dapat memungkinkan untuk meningkatkan kinerja OPD Kota pekanbaru. Adapun demikian, faktor pengawasan kualitas laporan keuangan akan menjadi pemicu yang memberikan dampak positif jika faktor ini di kaitkan dengan teori penerapan akuntansi sektor publik (Wina & Khairani, 2014). Penelitian tersebut memberikan dampak positif

terhadap hasil kinerja OPD kota Pekanbaru. Hal ini kemudian di jelaskan secara terperinci di point selanjutnya.

4.3.3. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kota Pekanbaru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji F pada tabel 4.11 diperoleh nilai F hitung sebesar 15.251 dengan tingkat signifikannya 0.000. Karena probabilitasnya lebih kecil dari 0.05 maka hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa Penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun simultan. (Pamungkas, 2012).

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengawasan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
2. Hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa penerapan akuntansi akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
3. Hasil pengujian secara determinasi dinyatakan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan mampu menerangkan atau menjelaskan pengaruh terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan melihat nilai R Square atau Koefisien Determinasi sebesar 33.3% namun pengaruh nya tidak mencapai 100% kemungkinan masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja yang peneliti tidak teliti.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis hendak memberikan beberapa saran untuk OPD Instansi pemerintah kota Pekanbaru dan juga untuk peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini agar menjadi lebih sempurna. Saran-saran yang peneliti berikan antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan lagi kinerja dalam bekerja sehingga tujuan dari instansi tersebut dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. (2012). Institutional Isomorphism dalam Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik di Indonesia. *Ebnews Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada Yogyakarta* .
- Bastian, I. (2011). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- BPKP. (2011). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010*. Jakarta Timur: Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan.
- Darwanis, Saputra, M., & Kartini. (2016). Effect of professionalism, competence, knowledge of financial management, and intensity guidance apparatus inspectorate for quality of financial statements (study on inspectorate regencies/cities in Aceh). *Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution (BRAND)*.
- Dr. Riduwan, M. (2010). *Skala Pengukuran Vaiabel-Variabel Penelitian* . Bandung : Alfabeta .
- Dwiyanto, A. (2012). *Reformasi Birokrasi di Indonesia, Edisi : Cet.Keempat*. Yogyakarta: PSKK-UGM.
- Fedrinawati, E. I. (2016). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pronorego.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2011). *Teori Akuntansi. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irianto, A. (2011). *Statistika Konsep Dasar Aplikasi dan Pengembangannya* . Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Jannaini, Y. (2012). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei pada Dinas Kota Bandung). *Universitas Komputer Indonesia*.

- Kota Pekanbaru. (2016). Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016. *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru*.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama*. Yogyakarta : UUI Press.10.
- Martono, N. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada .
- Nasirn, A., & Oktari, R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Nurgaeni, & Budiantara, M. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* .
- Pamungkas, B. (2012). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading Vol. 12 No. 2*.
- Pemerintah Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standa Akuntansi Pemerintahan . Jakarta.
- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2019). *Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru*. Retrieved from pekanbaru.go.id: <https://pekanbaru.go.id/p/hal/organisasi-perangkat-daerah>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2010). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 TAHUN 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Pratiwi, S. (2013). Pengaruh Penerapan AKuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Unikom*.
- Ramdhanu, L. R. (2019). Pengaruh Penerapan Laporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada BAPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017).

Sari, P. W. (2015). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Unikom*.

Siregar, S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana .

Wina, I. P., & Khairani, S. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, dan Dishub Prov).

Wulandari, F. O. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang). *UMSLibrary*.

Yusra, M. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh.

